

PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU HIDUP BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

¹ Nurrahmad Pebriansyah, ² Febri Yuliani, ³ Adianto

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Universitas Riau

nurrahmad.pebriansyah@gmail.com, febriyuliani.fisipunri@gmail.com,

adianto@lecturer.unri.ac.id

Pekanbaru, Riau, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to explain how the municipal government of Pekanbaru provides guidelines that should be carried out by the community in carrying out activities in Pekanbaru. This research uses qualitative research methods. The selection of research informants used purposive sampling technique. Primary data collection from interviews, while secondary data from documentation and literature study. Data analysis using an interactive model. The results showed that the application of new life behavior guidelines based on the Mayor of Pekanbaru regulation number 104 of 2020 concerning guidelines for new productive and safe lives in the prevention and control of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in Pekanbaru has paid attention to the lives of its people, it can be seen from its existence. Guidelines for carrying out activities and activities during the Covid-19 pandemic. However, there is still an increase in positive cases of Covid-19 due to people who do not comply with applicable policies. For this reason, the municipal government of Pekanbaru needs to reaffirm people who commit violations so that they can comply with health protocols, especially in crowded places.

Keywords: Covid-19; Implementation, Guidelines, New Life Behavior

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemerintah kota pekanbaru memberikan pedoman yang harus dilakukan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan aktivitas di lingkungan kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penenilitian kualitatif. Pemeilihan informan penelitian menggunakan teknik *perposive sampling*. Pengambilan data primier dari wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan model interktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pedoman perilaku hidup baru berdasarkan peraturan walikota pekanbaru nomor 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19) di kota pekanbaru sudah memperhatikan kehidupan masyarakatnya, terlihat dari adanya pedoman dalam melakukan aktivitas dan kegiatan di masa pandemi covid-19. Namun masih terdapat peningkatan kasus positif covid-19 dikarenakan masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan yang berlaku. Untuk itu, pemerintah kota pekanbaru perlu menegaskan kembali terhap masyarakat yang melakukan pelanggaran agar dapat mematuhi protokol kesehatan terutama ditempat ramai.

Kata Kunci: , Covid-19; Pedoman; Penerapan; Perilaku hidup Baru

PENDAHULUAN

Persoalan kebencanaan beberapa tahun terakhir ini telah menjadi kajian yang menarik untuk dibahas, tidak saja oleh pemerintah tetapi juga organisasi non pemerintah maupun masyarakat. Berbagai kejadian bencana yang tidak terduga telah membukakan mata semua pihak betapa pentingnya penanggulangan terhadap bencana di masa yang akan datang (Putera et al., 2020). Salah satu bencana yang menggemparkan Indonesia bahkan dunia yaitu corona virus desesase 2019 (covid-19). Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Secara historis virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Sementara menurut World Health Organization, Virus korona adalah virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah (MERS-CoV) dan Sindrom penafasan akut parah (SARSCoV)(Mukharom & Aravik, 2020).

Saat ini Wabah Corona virus Disease (Covid-19) menjadi isu kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penanggulangan ekstrem seperti Lockdown suatu daerah bahkan suatu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut (Zahrotunnimah, 2020). wabah ini menyerang semua kalangan dan daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan yang mengakibatkan banyak kerugian baik dari sektor ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. . Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang dan jasa yang multi-etnik sehingga mendatangkan berbagai investor dari luar Kota Pekanbaru untuk menanamkan modalnya seperti tempat penginapan dan tempat berbelanja sehingga Kota Pekanbaru menjadi lebih berkembang dan menarik untuk dikunjungi seperti saat ini. Kota Pekanbaru juga merupakan kota dengan tingkat pendidikan yang tinggi di Provinsi Riau dan menjadi incaran bagi kalangan muda untuk melanjutkan pendidikan baik ditingkat SLTP, SLTA, maupun perguruan Tinggi.

Covid-19 yang sedang menggemparkan dunia juga dirasakan masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dan masyarakat Provinsi Riau umumnya. Wabah yang menyerang sistem pernafasan ini telah banyak memakan korban dan penyebarannya yang sangat cepat. Penyebarannya yang sangat cepat dan sulit dikendalikan serta belum adanya ditemukan obat ataupun vaksin yang dapan menangani wabah Covid-19 ini sehingga menjadi bayang-bayang ketakutan bagi masyarakat. Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota dan jumlah penduduk yang paling banyak di Provinsi Riau, juga mendapatkan prediket kota yang banyak terpapar Covid-19 tersebut.

Banyaknya kasus positif covid-19 yang ditemukan di kota pekanbaru mencapai 17.541 kasus, sehingga kota pekanbaru termasuk kedalam zona merah penyebaran covid-19 di Indonesia. Tingginya kasus covid-19 di kota pekanbaru membuat banyaknya aktivitas dan kegiatan masyarakat yang dibatasi diberbagai tempat yang dapat menumbulkan kerumunan sehingga memudahkan penyebaran covid-19.

Setelah adanya aturan baru yang dikeluarkan peraturan new normal oleh Kemenkes no. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease (covid-19) maka walikota pekanbaru mengeluarkan peraturan baru untuk mengatur kegiatan dan aktivitas masyarakat di kota pekanbaru dalam konteks new normal dengan perilaku hidup baru yaitu peraturan walikota pekanbaru nomor 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease (covid-19) di kota pekanbaru. peraturan ini mencakupi berbagai aspek kehidupan diantaranya layanan kesehatan, kegiatan diluar rumah, tempat kerja, layanan pendidikan dan sekolah, kegiatan perjalanan dinas/bisnis, penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olahraga, pusat keramaian, transportasi publik, dan kegiatan keagamaan dirumah ibadah.

Penerapan pedoman perilaku hidup baru ini bertujuan untuk mengatur kegiatan dan aktivitas masyarakat agar dapat berjalan seperti biasanya sebelum adanya pandemi covid-19. Kegiatan dan aktivitas yang dilakukan saat ini tidak lepas dari protokol kesehatan seperti memakai masker jika berada diluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan menghindari kerumunan guna untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19. Hal ini dilakukan karena covid-19 mudah menularkan dan sulitnya dikendalikan sehingga Satgas covid-19 kewalahan dalam menanggulangi jika tidak dibantu oleh masyarakat.

Penyebaran yang sulit dikendalikan mengakibatkan banyak kegiatan dan aktivitas yang diberikan batasan, terutama seperti layanan di tempat kerja, aktivitas di layanan pendidikan dan sekolah, serta kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Kegiatan dan aktivitas yang menjadi rutinitas masyarakat dibatasi, sehingga masyarakat banyak menolak dan melanggar aturan kebijakan sehingga peningkatan kasus terus bertambah dan sulit dicegah serta dikendalikan.

Berdasarkan pemaparan diatas, dilihat bahwa dalam penerapan pedoman perilaku hidup baru terlibat antara pemerintah selaku Satgas dengan masyarakat untuk tercapainya tujuan kebijakan. Peran pemerintah sebagai implementor kebijakan yaitu melakukan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk

mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai "outcome" (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai "policy delivery system". Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatan-kegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki (Tachan, 2006).

Menurut argumen Grindle (dalam Elwan.L.O.M, 2011: 22) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik amat ditentukan oleh derajat dapat tidaknya kebijakan itu diterapkan atau implementabilitas (*implementability*) dari kebijakan tersebut. Implementabilitas ini dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*contexts of policy implementation*) (Supriadin et al., 2020).

Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (melaksanakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). *To give practica effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi (La Ode Muhammad Elwan, 2018).

Menurut Jones (dalam La Ode Muhammad Elwan, S., & Pramusinto, A. 2011:9) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah. Proses implementasi bukan proses mekanis dimana setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai skenario pembuat kebijakan. Artinya bahwa, ia merupakan proses yang rumit, diwarnai perbenturan kepentingan antaraktor yang terlibat, sehingga tujuan, target, dan strategi implementasi dapat berkembang (Muliati, 2018).

Peningkatan kasus covid-19 di kota pekanbaru, maka untuk melihat penerapan pedoman perilaku hidup baru dilihat dari tiga kriteria menurut Matland yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, dan ketepatan target (Heriyanto et al., 2019). ketepatan kebijakan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sedangkan ketepatan pelaksana merupakan Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-

masyarakat/swasta, atau implementasi ke kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat.

Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya di serahkan kepada masyarakat. ketepatan target menilai apakah masyarakat yang menjadi target sasaran sudah siap untuk diintervensikan atau belum, sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan baik.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut (Craswel, 2014) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian merupakan tipe penelitian yang menyediakan gambaran terperinci dan sangat akurat, menemukan data baru yang bertentangan dengan data lama, menciptakan serangkaian kategori dan menjelaskan rangkaian situasi yang terjadi (Neuman, 2015). Dalam menetapkan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2012) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian dalam penelitian ini ialah Pengurus di Sekretariat Satuan Tugas Covid19 Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Sosial Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Analis Pengurus Sarana dan Prasarana Masjid Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Lurah Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Pendeta HKBP Resort Rajawali Distrik XXII Riau Kota Pekanbaru, Masyarakat yang melakukan kegiatan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru : Tempat Kerja, Layanan Pendidikan dan Sekolah, dan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah. Lokasi penelitian pada wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan fokus penelitian pada tiga tempat yaitu tempat kerja, layanan pendidikan dan sekolah, dan rumah ibadah. Analisis data menggunakan model interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 104 tahun 2020 merupakan yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru yang didalamnya mengenai pelaksanaan pedoman perilaku hidup baru. Pedoman perilaku hidup baru merupakan upaya pemerintah dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota berdasarkan keputusan-keputusan yang sebelumnya telah ditetapkan secara bersama melalui beberapa prosedur pemerintahan. Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2019 tentang pedoman perilaku hidup baru, tujuannya yaitu memberikan arahan untuk pengembangan tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam tatanan normal baru dan juga meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah, tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid19 di daerah dan serta meningkatkan partisipasi semua unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kesehatan tatanan normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Kebijakan perilaku hidup baru yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat yang buat oleh pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat dari hasil wawancara berikut :

"Jadi perwako 104 ini adalah memang luar biasa, belum ada satupun mungkin di Indonesia yang membuat perwako, kita sudah buat masalah tentang bagaimana kita menghadapi pandemi ini tapi bisnis jalan juga. Kita memutuskan tapi bisnis jalan". (Wawancara dengan Bapak Yunaldi Santiago selaku Pengurus di Sekretariat Satuan Tugas Covid19 di Kota Pekanbaru, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat dilihat bahwa dalam mengatasi pandemi Covid19 di Kota Pekanbaru sudah ada penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dan sudah cukup baik diterapkan. Tetapi masih juga banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku seperti wajib menggunakan masker jika berada ditempat umum, menghindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun, serta menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan yang lainnya.

Penerapan pedoman perilaku hidup baru belum dapat berjalan dengan maksimal diterapkan sesuai dengan ketentuannya, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang melanggar dan belum memahami sepenuhnya isi dari peraturan Walikota Pekanbaru nomor 104 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru serta kurangnya kesadaran dalam mematuhi berupa protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari guna untuk mencegah penyebaran Covid19. Dapat dilihat dari tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekap Data Covid-19 di Provinsi Riau dari tanggal 3 maret 2020 s.d 30 Maret 2021 Pukul 16:26:56 WIB

No	Kabupaten/Kota	Isolasi	Rawat	Sembuh	Meninggal	Konfirmasi
1	Kab. Rokan Hilir	35	5	1.116	31	1.187
2	Kab. Rokan Hulu	27	31	788	47	893
3	Kab. Kampar	24	40	2.328	88	2.480
4	Kab. Kuantan Singingi	26	8	792	20	846
5	Kota Pekanbaru	434	219	15.559	351	16.563
6	Kab. Dumai	56	26	2.917	52	3.051
7	Kab. Bengkalis	42	24	2.147	67	2.280
8	Kab. Siak	88	34	2.376	62	2.560
9	Kab. Kep. Meranti	15	5	306	6	332
10	Kab. Pelalawan	20	7	1.234	25	1.286
11	Kab. Indragiri Hilir	4	10	918	50	982
12	Kab. Indragiri Hulu	30	9	1.306	37	1.382
13	Daerah lainnya	35	19	686	10	750

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2021/ <https://corona.riau.go.id/>

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru merupakan kota/kabupaten yang paling banyak ditemukan terkena positif Covid-19 di Provinsi Riau dengan jumlah total sebanyak 16.563 kasus yang terdiri dari 434 kasus diisolasi, 219 kasus dirawat, 15.559 kasus yang sembuh dan 351 kasus meninggal. Selanjutnya diikuti oleh kabupaten siak, kabupaten kampar dan kota dumai yang menjadi kota/kabupaten yang tinggi angka kasus positif Covid-19 di Provinsi Riau. Meningkatnya jumlah penduduk yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru, sehingga sulitnya untuk mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Salah satu contohnya yaitu di Kecamatan Tampan yang saat ini menjadi kecamatan ataupun wilayah di Kota Pekanbaru yang paling banyak ditemukan kasus Covid-19. Diketahui bahwa Kecamatan Tampan merupakan yang paling banyak ditemukan kasus Covid-19 yaitu sebanyak 933 kasus terdiri dari 327 kasus isolasi, 110 kasus dirawat, 481 kasus dinyatakan sembuh dan 15 kasus yang meninggal.

Tingginya angka positif Covid-19 di Kota Pekanbaru, maka untuk penyebaran penularannya juga cukup tinggi dan cepat kepada masyarakat lainnya. Kesulitan yang dirasakan oleh Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan aturan-aturan yang sudah diberlakukan dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru. Tidak sejalannya antara Satgas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dengan masyarakat baik penduduk asli tempatan maupun pendatang, akan menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19 setiap harinya seperti saat ini.

Ketepatan Kebijakan

Kebijakan merupakan salah satu komponen penting dalam laju pertumbuhan suatu negara, sebagai respon dan intervensi dari masalah publik dan sebagai upaya pemerintah untuk manajemen kehidupan bersama. Semua negara menghadapi masalah yang relatif

sama dan yang membedakannya adalah bagaimana pemerintah merespon masalah tersebut untuk diselesaikan. Penyelesaian suatu masalah tergantung dari kemampuan aktor kebijakan sebagai pemangku kebijakan untuk mengembangkan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan publik yang unggul akan menentukan keunggulan suatu negara baik saat ini maupun di masa depan.

Ketepatan kebijakan merupakan sebagai pola ketergantungan kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh aktor kebijakan untuk diterapkan. Ketepatan kebijakan dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur kehidupan bersama, sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas, bukan perorangan ataupun kelompok tertentu.

Setiap kebijakan yang dibuat pastilah mempunyai tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan harusnya sesuai dengan target kebijakan yang dituju agar masalah yang dihadapi terselesaikan. Ketepatan kebijakan merupakan ujung tombak dari keberhasilan dari implementasi sebuah kebijakan.

"Perwako ini sudah sangat jelas ya, jadi saya rasa sudah sangat tepat untuk mencegah perkebangan covid. Tinggal bagaimana perwako ini dijalankan dan ditaati oleh semua masyarakat baik di pemerintah maupun sipil. Karenakan perwako ini sudah menjelaskan dan mengatur semuanya dan ini sudah sangat tepat". (Wawancara bersama Bapak Fakhruddin selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa, perwako 104 tentang pedoman perilaku hidup baru sudah tepat sasaran dan mencakupi seluruh kegiatan dan aktifitas masyarakat Kota Pekanbaru. Hanya saja bagaimana penerapan dari perwako yang sudah tepat ini untuk di jalankan dan dipatuhi agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mengatasi pandemi yang tengah berlangsung.

Menurut Satpol PP diatas bahwa, kebijakan yang sudah tepat tidak akan dapat mencapai tujuan apabila tidak dijalankan oleh semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam menjalankan perilaku hidup baru di Kota Pekanbaru semua pihak yang terkait harus mendukung dan menjalankan aturan yang berlaku sehingga dapat mencegah dan mengendalikan Covid19 serta dapat kembali beraktivitas seperti sebelumnya.

Perubahan perilaku hidup baru masyarakat Kota Pekanbaru dengan adanya perwako 104 ini hendaknya dapat merubah kebiasaan masyarakat dalam beraktivitas sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Ketepatan Pelaksana

Dalam hal ini sebagai pelaksana dari penerapan pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (Covid19) di Kota Pekanbaru sedapat mungkin meminimalisir atau mengatasi permasalahan yang ditemui dalam proses penerapannya. Dilihat dari aktor kebijakan yang

ditunjuk sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing dalam menangani bencana tersebut.

"Dalam satgas inikan terbentuk dari beberapa instansi yang berkoordinasi, jadi penempatan bidang dalam satgas juga sesuai dengan bidang keahlian dari instansinya sendiri. Contoh untuk kesehatan dari dinas kesehatan, penertiban dan penerapan hukum dari kepolisian dan Satpol PP. Jadi penempatan dalam struktur pelaksanaan satgas sudah sesuai dengan tim ahli bidang kajiannya sehingga hanya butuh koordinasi saja antara satu instansi dengan instansi lainnya." (Wawancara dengan Bapak Yunaldi Santiago selaku Pengurus di Sekretariat Satuan Tugas Covid19 di Kota Pekanbaru, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penelitian diatas, terlihat bahwa penetapan satgas sudah sesuai dengan bidang keahliannya tersendiri. Banyaknya bidang-bidang yang terkait sudah sesuai dengan ketentuan dan keahlian dari bidangnya itu sendiri. Contohnya adalah sebagai koordinator kesekretariatan satgas yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru yang mana tugas dan fungsi dari BPBD ini adalah menanggulangi bencana baik bencana alam ataupun bencana non alam yang ada didaerahnya dengan pedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPBN). Sedangkan Covid19 adalah salah satu yang termasuk dalam kategori bencana non alam.

Selain BPBD, yang termasuk dalam satgas Pencegahan dan Penanggulangan Covid19 dalam perubahan perilaku hidup baru yaitu dinas kesehatan Kota Pekanbaru dalam penanganan bagian kesehatan, Satpol PP dan kepolisian sebagai penertiban, penegak dan penerapan hukum, dan bidang lainnya yang akan mencegah dan menanggulangi sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini dilakukan karena untuk memudahkan saling berkoordinasi antara satu instansi dengan instansi lainnya dan akan cepat tanggap dalam menangani Covid19. Kota Pekanbaru sudah memiliki berbagai macam instansi dibidang keilmuan sehingga tidak perlu lagi membuat instansi bidang keahlian sendiri sehingga akan memakan waktu dalam menghadapi masalah.

Ketepatan Target

Ketepatan target dalam penerapan kebijakan menurut Matland adalah bagaimana target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan dan tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Pelaksanaan kebijakan menyesuaikan targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak. Intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki penerapan kebijakan sebelumnya, telah banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada

prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama tidak efektifinya dengan kebijakan sebelumnya.

Kebijakan perilaku hidup baru merupakan suatu aturan baru yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, kebijakan serupa merupakan sudah ada sejak dulu diterapkan dan dilaksanakan yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Perilaku Hidup Baru dan Sehat (PHBS) merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat agar tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. hal-hal yang terkait dalam perilaku hidup bersih dan sehat yaitu : makan makanan bergizi, olahraga teratur, rajin mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir, menggunakan air bersih, tidak merokok, terutama dalam ruangan, memberantas jentik nyamuk, minimal seminggu sekali, membuang sampah pada tempatnya.

Kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan dari perilaku hidup baru merupakan bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Kesiapan yang dirasakan oleh masyarakat terkait perilaku hidup baru adalah tidak terlalu memberatkan dan dibebani walaupun ada beberapa aktivitas dan kegiatan yang memang dilakukan secara terbatas. Seperti tidak dapat melakukan aktivitas dengan kapasitas yang ramai dan dibatasi sehingga terjadi ketidak efisennya seperti sebelum adanya pandemi.

Berikut wawancara dengan Satpol PP terkait ketepatan target dalam penerapan kebijakan perilaku hidup baru sebagai berikut :

"Target kita adalah masyarakat Kota Pekanbaru dan yang berada di Kota Pekanbaru. Kita tidak melihat profesi atau jabatannya, sampai sekarang sudah kami sampaikan ke masyarakat tentang perwako ini ya karena kami Satpol PP juga merupakan bagian dari pelaksanaan perwako. kita sudah selalu mengikatkan sudah kita bersosialisasi individu yang tidak tertib kebanyakan bukan dari kitanya kebanyakan dari individu yang tidak sadar saya nyata atau upaya apapun sudah sering kami lakukan dan berita sudah tersebar dimana-mana". (Wawancara bersama Bapak Fakhruddin selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Pekanbaru, 2021)

Menurut hasil wawancara penelitian diatas, Satpol PP yang merupakan aktor kebijakan di daerah dan juga bagian dari satgas sudah melakukan penyampaian informasi terkait kebijakan perilaku hidup baru di masa pandemi saat ini. Sosialisasi yang dilakukan sudah disampaikan kepada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru dan yang melakukan aktivitas di Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Target yang ditetapkan adalah seluruh masyarakat dan yang berada di Kota Pekanbaru pada saat ini. Sosialisasi yang dilakukan juga berbagai cara mulai dari secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui media masa baik cetak maupun digital.

KESIMPULAN

Penerapan pedoman perilaku hidup baru adalah langkah baru yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru dalam mengatasi permasalahan berkegiatan dan beraktivitas. Pedoman perilaku hidup baru juga merupakan turunan kebijakan dari kebijakan *new normal* yang telah berlaku. Dalam hal ini dilihat dari penilaian kriteria oleh Matland yang mana kesemuanya sudah diterapkan dan terlaksana dengan baik sesuai tujuan peraturan yang ada. Dilihat dari ketepatan kebijakan yang telah sesuai, pelaksanaan yang merata, dan target kebijakan yang melakukan kebijakan yang sudah diterapkan. Sehingga kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, kendala yang dihadapi yaitu kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang masih kurang sehingga pencegahan dan pengendalian covid-19 sulit dihadapi.

Peneliti menyarankan kepada pemerintah kota pekanbaru beserta satgas penanggulangan dan pencegahan covid-19 di kota pekanbaru untuk lebih tegas dalam menerapkan kebijakan yang sudah berlaku. Pencegahan dan dapat ditanggulangnya pandemi ini berdampak baik untuk kita bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Craswel, W. J. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar.
- Heriyanto, M., Adianto, & As'ari, H. (2019). *MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM CSR DI INDONESIA Praktek di PT. Pertamina RU II Dumai dan PT. Chevron Pasicik Indonesia (CPI) RIAU*. Taman Karya.
- La Ode Muhammad Elwan. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Journal Publicuho*, 1(2), 1–17.
- Mukharom, M., & Aravik, H. (2020). Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096>
- Muliati, S. (2018). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Kehutanan Di Kabupaten Konawe Selatan. *Journal Publicuho*, 1(3), 14. <https://doi.org/10.35817/jpu.v1i3.6326>
- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. PT Indeks.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang

Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 155. <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.

Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). Implementasi Peraturan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 3(1), 67. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

Tachan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung.

Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 247–260. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>